

**EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS EI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

<b>DOMAIN 1</b>						
<b>KEBIJAKAN INTERNAL SPBE</b>						
<b>INDIKATOR</b>	<b>URAIAN INDIKATOR</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR KOTA BONTANG</b>	<b>PENJELASAN LEVEL</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	
<b>ASPEK 1</b>						
<b>KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA S</b>						
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE/TIK	LEVEL 3	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja)	LEVEL 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung standarisasi penyusunan proses bisnis	1	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government

		... (dan) terintegrasi?			2	SOP Permintaan Data CCTV, SOP Permohonan Domain, SOP Permohonan Hosting, SOP Penggunaan Ruang Command Center, SOP Pengawasan Website Perangkat Daerah, SOP Pengawasan CCTV, SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Medsos
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait rencana induk SPBE?	LEVEL 4	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	1	Master Plan E-Government
					2	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK?	LEVEL 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Master Plan E-Government
					2	Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan

				Daerah.		Statistik
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data center)?	LEVEL 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data untuk melaksanakan integrasi pusat data dengan pusat data milik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau untuk rencana transisi penggunaan pusat data nasional.	1	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan E-Government
					2	SOP Integrasi Data Nomor : 067.2/034.2/DKIS.02
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi?	LEVEL 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	1	SOP Integrasi Data Nomor : 067.2/034.2/DKIS.02

7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai?	LEVEL 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan semua aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan E-Government
---	---	---	---------	--	---	--

<b>DOMAIN 1</b>						
<b>KEBIJAKAN INTERNAL SPBE</b>						
<b>INDIKATOR</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR KOTA BONTANG</b>	<b>PENJELASAN LEVEL</b>	<b>DATA DUKUNG</b>	
<b>ASPEK 2</b>						
<b>KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPE</b>						
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.	1	Konsep Tata Naskah Dinas Elektronik

9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian?	LEVEL 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 282 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2014
					2	SOP Pembuatan Aplikasi Baru Nomor : 067.2/16/BKPP.03 3. SOP Pelayanan Data Nomor : 067.2/17/BKPP.03 4. SOP Pengelolaan Database SIMPEG Nomor : 067.2/21/BKPP.03
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran?	LEVEL 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan E-Government

11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan?	LEVEL 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	1	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
					2	SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) e-finance ( <a href="http://efinance.bontangkota.go.id">http://efinance.bontangkota.go.id</a> )
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja?	LEVEL 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 254 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2018

					2	Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 243 Tahun 2018 Tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2018
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik?	LEVEL 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.	1	Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 143 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kota Bontang
					2	Perwali Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik?	LEVEL 4	Kebijakan mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.	1	SOP Penanganan Pengaduan Melalui Aplikasi kesah.bontangkota.go.id Nomor 067.2/032.6/DKIS.02

15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?	LEVEL 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Aplikasi Sim Hukum ( <a href="http://hukum.bontangkota.go.id">http://hukum.bontangkota.go.id</a> )
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal untuk WBS?	LEVEL 3	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan WBS di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.	1	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana
17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah	Apakah instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara?	LEVEL 4	Kebijakan mendukung kebutuhan dari sistem pelayanan publik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.	1	Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota



					2	Perwali Pelayanan Publik
--	--	--	--	--	---	-----------------------------

**DOMAIN 2**

**TATA KELOLA SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR KOTA BONTANG	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG
-----------	--------	------------	---	---------------------	-------------

**ASPEK 3**

**KELEMBAGAAN**

18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Apakah instansi Saudara memiliki Tim Pengarah SPBE?	LEVEL 4	Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.	1	Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Internal SPBE
					2	Notulen Rapat
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi?	LEVEL 3	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada seluruh unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.	1	Perwali Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota
					2	Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengesahan SOP SKPD Di Lingkungan Pemkot Bontang
					3	SOP Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Nomor : 721.28VI/2017/Ba selibang

					4	SOP Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nomor : 721.38VI/2017/Ba pelitbang
					5	SOP Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Nomor : 721.29VI/2017/Ba pelitbang

**DOMAIN 2**

**TATA KELOLA SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR KOTA BONTANG	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG
-----------	--------	------------	--	------------------	-------------

**ASPEK 4**

**STRATEGI DAN PERENCANAAN**

20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki dokumen rencana induk SPBE?	LEVEL 4	Pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir dan dipantau serta dievaluasi secara berkala	1	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan E-Government
----	--	--	---------	--	---	--

21	Anggaran dan Belanja TIK	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE?	LEVEL 4	Seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.	1	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-government
----	--------------------------	---	---------	---	---	--

**DOMAIN 2**

**TATA KELOLA SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR KOTA BONTANG	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG
-----------	--------	------------	--	------------------	-------------

**ASPEK 5**

**TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIK**

22	Pengoperasian Pusat Data	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki layanan pusat data (data center)?	LEVEL 4	Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (data center) dilakukan secara terpusat; Monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman aktivitas pusat data (data center).	1	SOP Data Center
23	Integrasi Sistem Aplikasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah melakukan integrasi sistem aplikasi?	LEVEL 2	Terdapat rencana integrasi sistem aplikasi tetapi diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	MoU Pemanfaatan Data Kependudukan (DKIS, DKKB Dan DSP3M)
					2	SOP Integrasi Data Nomor : 067.2/034.2/DKIS.02 dan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan E-Government

24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara menggunakan aplikasi umum berbagi pakai?	LEVEL 4	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai Instansi Pemerintah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.	1	Cloud, Simtasu, . E-Finance ( <a href="http://efinance.bontangkota.go.id">http://efinance.bontangkota.go.id</a> ), Email, Simpeg ( <a href="https://simpeg.bontangkota.go.id">https://simpeg.bontangkota.go.id</a> ), SPSE
----	--	--	---------	--	---	--

**DOMAIN 3  
LAYANAN SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR KOTA BONTANG	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG
-----------	--------	------------	--	------------------	-------------

**ASPEK 6  
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBAS**

25	Layanan Naskah Dinas	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem naskah dinas elektronik?	LEVEL 3	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme	1	Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
----	----------------------	--	---------	---	---	---

				persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di internal Instansi Pusat/Pemerintah	2	Simtasu (tasu.setda.bontangkota.go.id)
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kepegawaian?	LEVEL 3	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya.	1	Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 282 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2014

					2	SOP Pembuatan Aplikasi Baru Nomor : 067.2/16/BKPP.03 , SOP Pelayanan Data Nomor : 067.2/17/BKPP.03 , SOP Pengelolaan Database SIMPEG Nomor : 067.2/21/BKPP.03 , SOP Peremajaan Data Nomor 067.2/24/BKPP.03 ,SOP Rekonsiliasi Database SAPK Nomor : 067.2/25/BKPP.03
27	Layanan Manajemen Perencanaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen perencanaan?	LEVEL 3	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan	1	e-planning ( <a href="http://e-planning.kotabontang.id">http://e-planning.kotabontang.id</a> )

				validasi perencanaan kegiatan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	2	e-project ( <a href="http://e-project.bontangkota.go.id">http://e-project.bontangkota.go.id</a> )
--	--	--	--	---	---	---



28	Layanan Manajemen Penganggaran	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem penganggaran?	LEVEL 4	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan.	1	e-finance (sim APBD)
----	--------------------------------	---	---------	---	---	----------------------

29	Layanan Manajemen Keuangan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi?	LEVEL 3	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	1	e-finance (sipkd)

--	--	--	--	--	--	--	--

30	Layanan Manajemen Kinerja	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kinerja?	LEVEL 3	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	1	e-sakip ( <a href="http://e-sakip.bontangkota.go.id/portal/home">http://e-sakip.bontangkota.go.id/portal/home</a> )
----	---------------------------	--	---------	--	---	---

31	Layanan Pengadaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pengadaan secara elektronik?	LEVEL 4	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.	1	SPSE, SIRUP, SIKAP, SOP
----	-------------------	--	---------	---	---	-------------------------

DOMAIN 3 LAYANAN SPBE					
INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	PENILAIAN MANDIRI TIM EVALUATOR KOTA BONTANG	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG
ASPEK 7 LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRO					

32	Layanan Pengaduan Publik	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem layanan pengaduan publik?	LEVEL 3	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan.	1	Kesah etam (e-lapor) ( <a href="http://kesah.bontangkota.go.id">http://kesah.bontangkota.go.id</a> )
					2	SOP Penanganan Pengaduan Melalui Aplikasi kesah.bontangkota.go.id Nomor 067.2/032.6/DKIS.02
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?	LEVEL 3	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat	1	Sim Hukum (JDIH) ( <a href="http://hukum.bontangkota.go.id/simhukum/login.php">http://hukum.bontangkota.go.id/simhukum/login.php</a> )

				sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum.		
--	--	--	--	--	--	--

34	Layanan Whistle Blowing System	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki Whistle-Blowing System (WBS)?	LEVEL 3	WBS menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan.	1	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi
					2	SMS Pengaduan dan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi



35-1	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	LEVEL 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.	1	e-rt ( <a href="https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda">https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda</a> )
					2	SIPUT ( <a href="https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home">https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home</a> )

35-2	Layanan Publik Instansi Pemeintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	LEVEL 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.	1	Sistem Informasi Monitoring Sembako (SI'MBAK) ( <a href="http://simbak.bontangkota.go.id">http://simbak.bontangkota.go.id</a> )
35-3	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	LEVEL 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.	1	Kesah etam (e-lapor) ( <a href="http://kesah.bontangkota.go.id">http://kesah.bontangkota.go.id</a> )
					2	SOP Penanganan Pengaduan Melalui Aplikasi kesah.bontangkota.go.id Nomor 067.2/032.6/DKIS.02



		2	Pemantauan dan evaluasi secara berkala	
LEVEL 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota tentang rencana induk SPBE (memuat tentang dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE, visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	Pemantauan dan evaluasi secara berkala	
LEVEL 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan sebagian muatan dari rencana induk SPBE	1	Keputusan Walikota tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	Integrasi data baik pusat maupun daerah	

	SPBE	3	pemantauan dan evaluasi secara berkala	
LEVEL 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota tentang pengaturan pengoperasian pusat data atau data center secara terintegrasi milik pemerintah pusat dan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	pemantauan dan evaluasi secara berkala	
LEVEL 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada sebagian sistem aplikasi di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota tentang pengaturan integrasi sistem aplikasi yang dapat dilakukan melalui integrasi layanan SPBE, integrasi middleware, maupun integrasi data antar pemerintah pusat	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	pemantauan dan evaluasi secara berkala	

LEVEL 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan semua aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota tentang pengaturan penggunaan semua aplikasi umum berbagi pakai (aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah secara terintegrasi dan dilakukan pemantauan evaluasi secara	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	pemantauan dan evaluasi secara berkala	

HASIL PENILAIAN TIM EVALUATOR UGM/MENPAN & RB	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
---	------------------	--------------------------------------	----------------------------------

BE

LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektroni	1	Keputusan Walikota tentang Tata Naskah Dinas Elektronik	Bagian Organisasi Setda
		2	SOP integrasi sistem tata naskah dinas elektronik	
		3	pemantauan dan evaluasi secara berkala	

LEVEL 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota dan SOP tentang integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian BKN atau sistem aplikasi lain di dalam instansi pusat/pemerintah daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		2	pemantauan dan evaluasi secara berkala	
LEVEL 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen perencanaan dan penganggaran di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota dan SOP tentang integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran (e-planning dan e-budgetting) dengan sistem aplikasi lain di dalam instansi pusat/pemerintah daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		2	pemantauan dan evaluasi secara berkala	

LEVEL 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota dan SOP tentang integrasi sistem manajemen keuangan (e-finance) dengan sistem aplikasi lain (simpatda, sismiop) di dalam Instansi Pusat/ Pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		2	pemantauan dan evaluasi secara berkala	
LEVEL 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota dan SOP tentang sistem manajemen kinerja berbasis elektronik sesuai dengan sasaran kinerja Pemerintah Kota Bontang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



		2	pemantauan dan evaluasi secara berkala	
LEVEL 3	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	SOP dan Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik	Bagian Layanan Pengadaan Setda
LEVEL 3	Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pengaduan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota tentang integrasi sistem pengaduan publik berbasis elektronik dengan sistem aplikasi lain baik instansi pusat ataupun pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	SOP dan laporan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan publik	

LEVEL 3	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan dari sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		Keputusan Walikota tentang integrasi system jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) berbasis elektronik baik dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah	Bagian Hukum Setda
		2	SOP monitoring dan evaluasi system jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) berbasis elektronik	
		3	laporan hasil monitoring	
LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait WBS	1	Perwali WBS	Inspektorat Daerah
		2	SOP Pengaduan Masyarakat dan SOP Pengaduan Tindak Pidana Korupsi SOP integrasi WBS dengan aplikasi lain	
		3	Pemantauan dan evaluasi secara berkala	
LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan Walikota Pelayanan Publik (masih dalam proses)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

		2	SOP Pelayanan Publik antar instansi pusat dan perangkat daerah	
--	--	---	--	--

HASIL PENILAIAN TIM EVALUATOR UGM/MENPAN & RB	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
---	------------------	--------------------------------------	----------------------------------

LEVEL 3	Belum melaksanakan evaluasi dan pemantauan secara berkala	1	Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Internal SPBE	Bagian Organisasi Setda
		2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan	
LEVEL 3	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada seluruh unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.	1	Melakukan penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala	Bagian Organisasi Setda
		2	pemantauan dan evaluasi dan diperbaiki secara berkesinambungan	

--	--	--	--	--

HASIL PENILAIAN TIM EVALUATOR UGM/MENPAN & RB	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
LEVEL 4	Belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala	1	Laporan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan pemutakhiran secara berkesinambunga	

LEVEL 1	Perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan SKPD belum dikonsultasikan pada unit pengelola TIK (DKIS)	1	Perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan SKPD dikonsultasikan pada DKIS	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	Telah terintegrasi dapat dikendalikan DKIS dan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala	
		3	Hasil evaluasi seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang terintegrasi di unit pengelola TIK (DKIS) ditindaklanjuti sebagai masukan perbaikan anggaran tahun berikutnya	
		4	Hasil evaluasi dan pelaporan	

HASIL PENILAIAN TIM EVALUATOR UGM/MENPAN & RB	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
ASIA			

LEVEL 3	Belum dilakukan pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (data center) secara terpusat, monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman aktivitas pusat data (data center).	1	Laporan peningkatan kinerja pada layanan pusat data atau data center dilakukan secara berkesinambungan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
LEVEL 2	Terdapat rencana integrasi sistem aplikasi tetapi diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Integrasi Sistem aplikasi telah dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	Integrasi Sistem aplikasi Pemerintah Daerah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala	
		3	Integrasi Sistem aplikasi dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah	

LEVEL 3	Belum diterapkan secara keseluruhan pada Perangkat Daerah dan belum dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala	1	Laporan penerapan sistem aplikasi umum berbagi pakai pada perangkat daerah secara berkala	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	Laporan penilaian dan evaluasi secara berkala	
		3	Laporan peningkatan kinerja aplikasi umum berbagai umum secara berkesinambungan	

HASIL PENILAIAN TIM EVALUATOR UGM/MENPAN & RB	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
---	------------------	--------------------------------------	----------------------------------

**IS ELEKTRONIK**

LEVEL 1	Sistem naskah dinas elektronik hanya menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) informasi seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi	1	1. Tersedianya sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespon kepada pengguna	Bagian Organisasi Setda
---------	---	---	--	-------------------------

		2	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan persuratan diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE misalnya layanan manajemen kepegawaian atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain	
		3	Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	
LEVEL 2	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi kepegawaian dan mengunduh dokumen data diri pegawai	1	1. Tersedianya sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal Instansi Pusat/Pemerintah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



		2	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan kepegawaian diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Badan Kependidikan	
		3	Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	
LEVEL 2	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan	1	1. Tersedianya Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

		2	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan perencanaan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain	
		3	Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	

LEVEL 2	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait penganggaran	1	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal Instansi Pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		2	Tersedianya sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan	

		3	Sistem manajemen penganggaran dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	
LEVEL 2	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dokumen terkait keuangan, dan memasukkan data keuangan	1	1. Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

		2	<p>Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan keuangan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti</p>	
		3	<p>Sistem manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi</p>	

LEVEL 2	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunggah kemajuan kinerja dan menampilkan rasio (persentase) kemajuan kinerja	1	1. Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Setda
		2	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan kolaborasi yang diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RKPD, e-Musrebang, dan	
		3	Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	

LEVEL 3	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi penyedia	1	1. Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah	Bagian Layanan Pengadaan Setda
		2	Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	

HASIL PENILAIAN TIM EVALUATOR UGM/MENPAN & RB	PENJELASAN LEVEL	DATA DUKUNG PENCAPAIAN LEVEL OPTIMAL	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
NIK			

LEVEL 3	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan	1	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja, atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2	Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	
LEVEL 1	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi hukum, regulasi, dan lain sebagainya	1	1. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait	Bagian Hukum Setda



		2	<p>Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum</p>
		3	<p>Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian</p>
		4	<p>Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi</p>

LEVEL 1	WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor	1	1. Tersedianya WBS menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan	Inspektorat Daerah
		2	WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain	

		3	WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	
LEVEL 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.	1	Tersedianya Sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi (e-rt ( <a href="https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda">https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda</a> , SIPUT ( <a href="https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home">https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home</a> ))	Kelurahan

LEVEL 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.	1	Tersedianya sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang menyediakan layanan kolaborasi (Sistem Informasi Monitoring Sembako (SI'MBAK) <a href="http://si-mbak.bontangkota">http://si-mbak.bontangkota</a>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LEVEL 4		1	Tersedianya sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang menyediakan layanan kolaborasi (Kesah Etam (E-Lapor) <a href="http://kesah.bontangkota.go.id">http://kesah.bontangkota.go.id</a>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

**TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018**

DOMAIN 1										
KEBIJAKAN INTERNAL SPBE										
INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN	KELENGKAPAN DATA DUKUNG SAAT INI		RENCANA AKSI TAHUN 2018	
							ADA	BELUM ADA		
ASPEK 1										
KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE										
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE/TIK	LEVEL 3	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota tentang Tim Pengarah SPBE yang memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE			
						2	Laporan Pemantauan dan evaluasi secara berkala penerapan SPBE			
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja) terintegrasi?	LEVEL 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung standarisasi penyusunan proses bisnis	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota tentang SOP SPBE terintegrasi baik pusat maupun daerah dan perangkat daerah			
						2	Laporan Pemantauan dan evaluasi secara berkala			



6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi?	LEVEL 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Kebijakan internal sistem aplikasi sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	1	Keputusan Walikota tentang pengaturan integrasi sistem aplikasi yang dapat dilakukan melalui integrasi layanan SPBE, integrasi middleware, maupun integrasi data antar pemerintah pusat dan daerah			
						2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala			
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan Walikota tentang pengaturan penggunaan semua aplikasi umum berbagi pakai (aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah secara terintegrasi dan dilakukan pemantauan evaluasi secara berkala			
						2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala			

**DOMAIN 1**

**KEBIJAKAN INTERNAL SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN			RENCANA AKSI TAHUN 2018
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--	--	-------------------------

**ASPEK 2**

**KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE**

8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas Elektronik			
						2	SOP integrasi sistem tata naskah dinas elektronik			
						3	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala			

9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian?	LEVEL 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah	Kebijakan internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen perubahan	1	Peraturan Walikota dan SOP tentang integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian BKN atau sistem aplikasi lain di dalam instansi pusat/pemerintah daerah			
						2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala			
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan penganggaran	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran	Kebijakan internal layanan manajemen perencanaan dan penganggaran sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan Walikota dan SOP tentang integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran (e-planning dan e-budgetting) dengan sistem aplikasi lain di dalam instansi pusat/pemerintah daerah			
						2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala			
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan	Kebijakan internal layanan manajemen keuangan sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen keuangan secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota dan SOP tentang integrasi sistem manajemen keuangan (e-finance) dengan sistem aplikasi lain (simpatda, sismiop) di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah			
						2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala			





16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal untuk WBS?	LEVEL 3	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan WBS di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.	Kebijakan internal layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan WBS secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah	1 2 3	Perwali WBS SOP Pengaduan Masyarakat dan SOP Pengaduan Tindak Pidana Korupsi SOP integrasi WBS dengan aplikasi lain  Pemantauan dan evaluasi secara berkala			
17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah	Apakah instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara	Kebijakan internal layanan publik sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1 2	Peraturan Walikota Pelayanan Publik secara elektronik  SOP Pelayanan Publik antar instansi pusat dan perangkat daerah			

**DOMAIN 2**

**TATA KELOLA SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN			RENCANA AKSI TAHUN 2018
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--	--	-------------------------

**ASPEK 3**

**KELEMBAGAAN**

18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Apakah instansi Saudara memiliki Tim Pengarah SPBE?	LEVEL 3	Tim pengarah SPBE telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan	Kinerja Tim Pengarah SPBE dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebaiknya diukur, dinilai, dan dievaluasi secara kuantitatif dan berkala	1	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan			
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi?	LEVEL 3	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada seluruh unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik sebaiknya dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala	1	Melakukan penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala			

				Pusat Pemerintahan Daerah Saudara.		2	Laporan pemantauan dan evaluasi dan diperbaiki secara berkesinambungan			
--	--	--	--	------------------------------------	--	---	--	--	--	--

**DOMAIN 2**

**TATA KELOLA SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN			RENCANA AKSI TAHUN 2018
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--	--	-------------------------

**ASPEK 4**

**STRATEGI DAN PERENCANAAN**

20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki dokumen rencana induk SPBE?	LEVEL 3	Terdapat dokumen rencana induk SPBE yang mencakup semua muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE	Pelaksanaan peta rencana dari rencana induk SPBE sebaiknya diterapkan secara konsisten dan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala	1 2	Laporan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE  Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan pemutakhiran secara berkesinambungan			
21	Anggaran dan Belanja TIK	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE?	LEVEL 1	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan untuk penerapan SPBE	Perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan di unit kerja/perangkat daerah sebaiknya dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan TIK untuk keterpaduan	1 2 3 4	Perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan SKPD dikonsultasikan pada DKIS  Telah terintegrasi dapat dikendalikan DKIS dan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala Hasil evaluasi seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang terintegrasi di unit pengelola TIK (DKIS) ditindaklanjuti sebagai masukan perbaikan anggaran tahun berikutnya  Hasil evaluasi dan pelaporan			

**DOMAIN 2**

## TATA KELOLA SPBE

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN			RENCANA AKSI TAHUN 2018
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--	--	-------------------------

## ASPEK 5

## TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

22	Pengoperasian Pusat Data	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki layanan pusat data (data center)?	LEVEL 3	Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (data center) dilakukan secara terpusat; Monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman aktivitas pusat data (data center)	Perencanaan kapasitas, pengendalian, dan pemantauan layanan dari satu atau beberapa pusat data (data center) sebaiknya dapat dilakukan secara berkala dan terpusat (manajemen tunggal)	1	Laporan peningkatan kinerja pada layanan pusat data atau data center dilakukan secara berkesinambungan		
23	Integrasi Sistem Aplikasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah melakukan integrasi sistem aplikasi?	LEVEL 3	Integrasi sistem aplikasi telah dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara	Integrasi sistem aplikasi sebaiknya dapat dikendalikan, diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE	1	Integrasi Sistem aplikasi telah dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah		
						2	Integrasi Sistem aplikasi Pemerintah Daerah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala		
						3	Integrasi Sistem aplikasi dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah		

24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara menggunakan aplikasi umum berbagi pakai?	LEVEL 3	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai Instansi Pemerintah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala	Penggunaan aplikasi umum sebaiknya diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPRF	1  2  3	Laporan penerapan sistem aplikasi umum berbagi pakai pada perangkat daerah secara berkala  Laporan penilaian dan evaluasi secara berkala  Laporan peningkatan kinerja aplikasi umum berbagai umum secara berkesinambungan			
----	--	--	---------	---	---	---------------------	---	--	--	--

**DOMAIN 3  
LAYANAN SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN			RENCANA AKSI TAHUN 2018
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--	--	-------------------------

**ASPEK 6**

**LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

25	Layanan Naskah Dinas	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem naskah dinas elektronik?	LEVEL 2	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.	Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada penggunaan naskah dinas elektronik dilaksanakan secara otomatis seperti menggugah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, serta sistem dapat merespon kepada pengguna terhadap mekanisme persetujuan, penyetoran tanda tangan digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1. Tersedianya sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespon kepada pengguna			
----	----------------------	--	---------	---	---	---	--	--	--	--

						2	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan persuratan diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE misalnya layanan manajemen kepegawaian atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain		
						3	Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi		
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kepegawaian?	LEVEL 3	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya.	Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE dan berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1. Tersedianya sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
						2	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan kepegawaian diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN)		

						3	Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi		
27	Layanan Manajemen Perencanaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen perencanaan?	LEVEL 3	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	Layanan manajemen perencanaan kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1. Tersedianya Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna.		
						2	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan perencanaan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain		
						3	Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi		

28	Layanan Manajemen Penganggaran	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem penganggaran?	LEVEL 3	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal Instansi Pemerinta.	Layanan manajemen penganggaran kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<p>1 Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal Instansi Pemerintah</p> <p>2 Tersedianya sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan</p> <p>3 Sistem manajemen penganggaran dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi</p>		
29	Layanan Manajemen Keuangan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi?	LEVEL 3	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari	Layanan manajemen keungan kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1 1. Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		



				persetujuan unit atasan dan validasi keuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		2	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan keuangan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan			
						3	Sistem manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi			
30	Layanan Manajemen Kinerja	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kinerja?	LEVEL 3	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	Layanan manajemen keungan kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1. Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah			
						2	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan kolaborasi yang diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RKPD, e-Musreimbang, dan sebagainya			

						3	Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi		
31	Layanan Pengadaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pengadaan secara elektronik?	LEVEL 4	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.	Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahana-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1. Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya 2.		
						2	Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi		

**DOMAIN 3  
LAYANAN SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN			RENCANA AKSI TAHUN 2018
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--	--	-------------------------

**ASPEK 7  
LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK**

32	Layanan Pengaduan Publik	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem layanan pengaduan publik?	LEVEL 2	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan	Layanan pengaduan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<p>1 Sistem pengaduan publik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja, atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan)</p> <p>2 Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi</p>			
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?	LEVEL 2	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum.	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan dokumentasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau menggugah informasi terkait dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan	1 1. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum			

						2	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum		
						3	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM		
						4	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi		
34	Layanan Whistle Blowing System	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki Whistle-Blowing System (WBS)?	LEVEL 1	WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor.	WBS sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerakan mekanisme nirsangkal dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pengaduan tersebut	1	1. Tersedianya WBS menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan		

						2	WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain			
						3	WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi			
35-1	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	LEVEL 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.	Layanan publik yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanaan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan	1	Tersedianya Sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi (e-rt ( <a href="https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda">https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda</a> , SIPUT ( <a href="https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home">https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home</a> ))			
35-2	Layanan Publik Instansi Pemeintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	LEVEL 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.	Layanan publik yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimanadapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal da eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan	1	Tersedianya sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang menyediakan layanan kolaborasi (Sistem Informasi Monitoring Sembako (S'IMBAK) <a href="http://simbak.bontangkota.go.id">http://simbak.bontangkota.go.id</a> )			

35-3	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	LEVEL 1	Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara darain (on- line	1	Tersedianya sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang menyediakan layanan kolaborasi (Kesah Etam (E- Lapor) <a href="http://kesah.bontangkota.go.id">http://kesah.bontangkota.go.id</a>			
------	--	--	---------	---	--	---	---	--	--	--

RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
		Bagian Organisasi Setda
		Bagian Organisasi Setda

	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>
		Bagian Organisasi Setda

		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Bagian Layanan Pengadaan Setda
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Bagian Hukum Setda

		Inspektorat Daerah
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>
		Bagian Organisasi Setda
		Bagian Organisasi Setda

RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
----------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Bagian Organisasi Setda

		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
--	--	--

Badan   Pengelolaan  
Keuangan Daerah

Badan   Pengelolaan  
Keuangan Daerah

		Bagian Organisasi Setda

		Bagian Layanan Pengadaan Setda
<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

Bagian Hukum Setda

		Inspektorat Daerah	

		Kelurahan Gunung Telihan/Belimbing/Gunung Elai
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
--	--	--



**TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SIKAP  
DI LINGKUNGAN PE**

KE					
INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN
<b>KEBIJAKA</b>					
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait rencana induk SPBE?	LEVEL 4	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen perubahan
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK?	LEVEL 4	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi	Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen perubahan

5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data center)?	LEVEL 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data untuk melaksanakan integrasi pusat data dengan pusat data milik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau untuk rencana transisi penggunaan pusat data nasional.	Kebijakan internal integrasi sebaiknya pengoperasian pusat data sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan pengintegrasian pusat data dengan pusat data lain atau pengaturan transisi menggunakan pusat data nasional
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi?	LEVEL 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah	Kebijakan internal sistem aplikasi sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

KE					
INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN
KEBIJA					

14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik	Kebijakan internal layanan pengaduan publik sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan pengaduan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah	Apakah instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara	Kebijakan internal layanan publik sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan publik secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------	--------------------

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------	--------------------

STF					
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki dokumen rencana induk SPBE?	LEVEL 3	Terdapat dokumen rencana induk SPBE yang mencakup semua muatan visi dan misi SPBE,	Pelaksanaan peta rencana dari rencana induk SPBE sebaiknya diterapkan secara konsisten dan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala

				arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE	
21	Anggaran dan Belanja TIK	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE?	LEVEL 1	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan dalam rencana kerja tahunan untuk penerapan SPBE	Perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan di unit kerja/perangkat daerah sebaiknya dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan TIK untuk keterpaduan

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN
TEKNOLC					

22	Pengoperasian Pusat Data	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki layanan pusat data (data center)?	LEVEL 3	Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (data center) dilakukan secara terpusat; Monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman aktivitas pusat data (data center)	Perencanaan kapasitas, pengendalian, dan pemantauan layanan dari satu atau beberapa pusat data (data center) sebaiknya dapat dilakukan secara berkala dan terpusat (manajemen tunggal)
23	Integrasi Sistem Aplikasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah melakukan integrasi sistem aplikasi?	LEVEL 3	Integrasi sistem aplikasi telah dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara	Integrasi sistem aplikasi sebaiknya dapat dikendalikan, diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara menggunakan aplikasi umum berbagi pakai?	LEVEL 3	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai Instansi Pemerintah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala	Penggunaan aplikasi umum sebaiknya diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN
<b>LAYANAN</b>					
32	Layanan Pengaduan Publik	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem layanan pengaduan publik?	LEVEL 2	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan	Layanan pengaduan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
35-3	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	LEVEL 1	Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomatisasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara darain (on-line)

**STEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
MERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018**

<b>DOMAIN 1</b>			
<b>KEBIJAKAN INTERNAL SPBE</b>			
<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>
<b>ASPEK 1</b>			
<b>ASPEK 1</b>			
<b>ASPEK 1</b>			
<b>ASPEK 1</b>			
1	Peraturan Walikota tentang rencana induk SPBE (memuat tentang dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE, visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE)		
2	Pemantauan dan evaluasi secara berkala		
1	Peraturan Walikota tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.		
2	Integrasi data baik pusat maupun daerah		
3	Laporan Pemantauan dan evaluasi secara berkala		

1	Peraturan Walikota tentang pengaturan pengoperasian pusat data atau data center secara terintegrasi			
2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala			
1	Peraturan/Keputusan Walikota tentang pengaturan integrasi sistem aplikasi yang dapat dilakukan melalui integrasi layanan SPBE, integrasi middleware, maupun integrasi data antar pemerintah pusat dan daerah			
2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala			
1	Peraturan/Keputusan Walikota tentang pengaturan penggunaan semua aplikasi umum berbagi pakai (aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah secara terintegrasi dan dilakukan pemantauan			
2	evaluasi secara berkala Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala			

**DOMAIN 1**

**KEBIJAKAN INTERNAL SPBE**

<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>

**ASPEK 2**

**KAN INTERNAL LAYANAN SPBE**



1	Peraturan/Keputusan Walikota tentang integrasi sistem pengaduan publik berbasis elektronik dengan sistem aplikasi lain baik instansi pusat ataupun pemerintah daerah			
2	SOP dan laporan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan publik			
1	Peraturan Walikota Pelayanan Publik secara elektronik			
2	SOP Pelayanan Publik antar instansi pusat dan perangkat daerah			

**DOMAIN 2**

**TATA KELOLA SPBE**

<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>

**ASPEK 3**

**KELEMBAGAAN**

**DOMAIN 2**

**TATA KELOLA SPBE**

<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>

**ASPEK 4**

**KATEGORI DAN PERENCANAAN**

1	Laporan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE			
---	--	--	--	--

2	Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan pemutakhiran secara berkesinambungan			
1	Perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan SKPD dikonsultasikan pada DKIS			
2	Telah terintegrasi dapat dikendalikan DKIS dan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala			
3	Hasil evaluasi seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang terintegrasi di unit pengelola TIK (DKIS) ditindaklanjuti sebagai masukan perbaikan anggaran tahun berikutnya			
4	Hasil evaluasi dan pelaporan			

**DOMAIN 2**

**TATA KELOLA SPBE**

<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>

**ASPEK 5**

**LOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

1	Laporan peningkatan kinerja pada layanan pusat data atau data center dilakukan secara berkesinambungan			
1	Integrasi Sistem aplikasi telah dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah			
2	Integrasi Sistem aplikasi Pemerintah Daerah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala			
3	Integrasi Sistem aplikasi dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah			
1	Laporan penerapan sistem aplikasi umum berbagi pakai pada perangkat daerah secara berkala			
2	Laporan penilaian dan evaluasi secara berkala			
3	Laporan peningkatan kinerja aplikasi umum berbagai umum secara berkesinambungan			

**DOMAIN 3**

**LAYANAN SPBE**

DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI TAHUN 2018	RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**ASPEK 7**

**√ PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK**

1	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja, atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan)			
2	Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi			
1	Tersedianya sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang menyediakan layanan kolaborasi (Keshah Etam (E-Lapor) <a href="http://kesah.bontangkota.go.id">http://kesah.bontangkota.go.id</a> )			

**PERANGKAT DAERAH  
PENAGGUNG JAWAB**

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

**PERANGKAT DAERAH  
PENAGGUNG JAWAB**

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

**PERANGKAT DAERAH  
PENAGGUNG JAWAB**

**PERANGKAT DAERAH  
PENAGGUNG JAWAB**

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

**PERANGKAT DAERAH  
PENAGGUNG JAWAB**



Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

**PERANGKAT DAERAH  
PENAGGUNG JAWAB**

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik

TINDAK

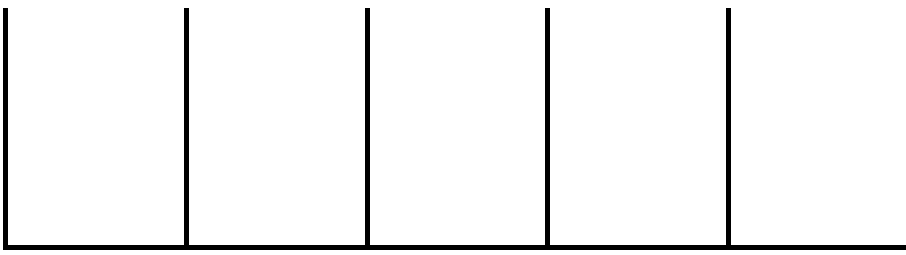
INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian?	LEVEL 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja

INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL

19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi?	LEVEL 3	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada seluruh unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.
----	------------------------------------	--	---------	---

INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL
-----------	------------------	------------	--------------------------	------------------

26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kepegawaian?	LEVEL 3	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya.
----	-------------------------------	--	---------	---



**LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018**

**DOMAIN 1**

**KEBIJAKAN INTERNAL SPBE**

REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI TAHUN 2018

**ASPEK 2**

**KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE**

Kebijakan internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen perubahan	1	Peraturan Walikota dan SOP tentang integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian BKN atau sistem aplikasi lain di dalam instansi pusat/pemerintah daerah	
	2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala	
Kebijakan layanan manajemen kinerja sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen kinerja secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan Walikota dan SOP tentang sistem manajemen kinerja berbasis elektronik sesuai dengan sasaran kinerja Pemerintah Kota Bontang	
	2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala	

**DOMAIN 2**

**TATA KELOLA SPBE**

REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI TAHUN 2018

**ASPEK 3**

**KELEMBAGAAN**

Penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik sebaiknya dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala	1	Melakukan penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala	
	2	Laporan pemantauan dan evaluasi dan diperbaiki secara berkesinambungan	

**DOMAIN 3  
LAYANAN SPBE**

REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI TAHUN 2018

**ASPEK 6**

**LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE dan berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1. Tersedianya sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	
	2	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan kepegawaian diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN)	

	3	Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	
--	---	---	--



RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
----------------------------	----------------------------	-------------------------------------

		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
--	--	--

		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
--	--	--

RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
----------------------------	----------------------------	-------------------------------------

		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
--	--	--

--

--

<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>
------------------------------------	------------------------------------	---

--

		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
--	--	--



## TINDAK LA

INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan penganggaran	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan
INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL

28	Layanan Manajemen Penganggaran	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem penganggaran?	LEVEL 3	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal Instansi Pemerinta.
29	Layanan Manajemen Keuangan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi?	LEVEL 3	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna

				seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
30	Layanan Manajemen Kinerja	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kinerja?	LEVEL 3	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

**ANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018**

**DOMAIN 1**

**KEBIJAKAN INTERNAL SPBE**

<b>REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>

**ASPEK 2**

**KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE**

Kebijakan internal layanan manajemen perencanaan dan penganggaran sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan Walikota dan SOP tentang integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran (e-planning dan e-budgetting) dengan sistem aplikasi lain di dalam instansi pusat/pemerintah daerah		
	2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala		
Kebijakan internal layanan manajemen keuangan sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen keuangan secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan/Keputusan Walikota dan SOP tentang integrasi sistem manajemen keuangan (e-finance) dengan sistem aplikasi lain (simpatda, sismiop) di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
	2	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala		

**DOMAIN 3**

**LAYANAN SPBE**

<b>REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>

**ASPEK 6**

**LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Layanan manajemen penganggaran kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- 1 Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal Instansi Pemerintah
- 2 Tersedianya sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan
- 3 Sistem manajemen penganggaran dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi

Layanan manajemen keuangan kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- 1. Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah



	<p>2 Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan keuangan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan</p> <p>3 Sistem manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi</p>		
<p>Layanan manajemen keungan kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/dintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p>	<p>1 1. Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p> <p>2 Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan kolaborasi yang diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RKPD, e-Musrebang, dan sebagainya</p> <p>3 Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi</p>		

<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>
	Badan    Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
	Badan    Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>

Badan    Pengelolaan  
Keuangan Aset Daerah

Badan    Pengelolaan  
Keuangan Daerah

	Bagian Organisasi Setda

TINDAK L

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------

16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal untuk WBS?	LEVEL 3	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan WBS di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.
----	---	--	---------	--

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------

34	Layanan Whistle Blowing System	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki Whistle-Blowing System (WBS)?	LEVEL 1	WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor.
----	--------------------------------	--	---------	--

--	--	--	--	--	--

**.ANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018**

**DOMAIN 1**

**KEBIJAKAN INTERNAL SPBE**

<b>REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>

**ASPEK 2**

**KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE**

Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan WBS secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah	1	Perwali WBS		
	2	SOP Pengaduan Masyarakat dan SOP Pengaduan Tindak Pidana Korupsi SOP integrasi WBS dengan aplikasi lain		
	3	Pemantauan dan evaluasi secara berkala		

**DOMAIN 3**

**LAYANAN SPBE**

<b>REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>

**ASPEK 7**

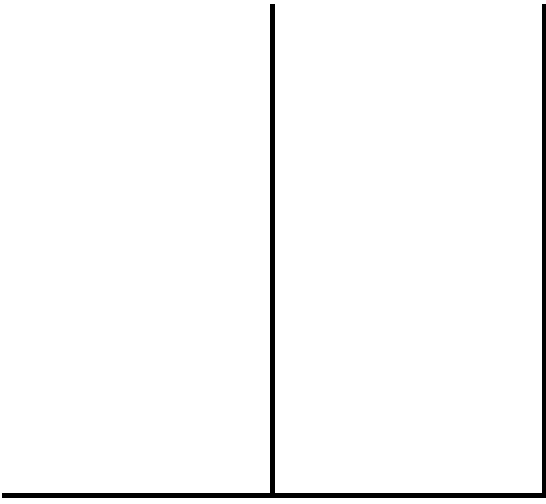
**LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK**

WBS sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerakan mekanisme nirsangkal dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pengaduan	1	1. Tersedianya WBS menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan		
---	---	--	--	--

	2	WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain	
	3	WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi	



<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>
	Inspektorat Daerah
<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>
	Inspektorat Daerah



TINDAK I

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------

15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?	LEVEL 1	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
----	--	---	---------	--

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------

33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?	LEVEL 2	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum.
----	---	--	---------	---

--	--	--	--	--	--

**LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018**

**DOMAIN 1**

**KEBIJAKAN INTERNAL SPBE**

<b>REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>

**ASPEK 2**

**KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE**

Kebijakan internal layanan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	Peraturan Walikota tentang integrasi system jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) berbasis elektronik baik dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah		
	3	SOP monitoring dan evaluasi system jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) berbasis elektronik laporan hasil monitoring		

**DOMAIN 3**

**LAYANAN SPBE**

<b>REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2018</b>	<b>RENCANA AKSI TAHUN 2019</b>

**ASPEK 7**

**LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK**

Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan dokumentasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau menggugah informasi terkait dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan	1	1. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum		
--	---	---	--	--

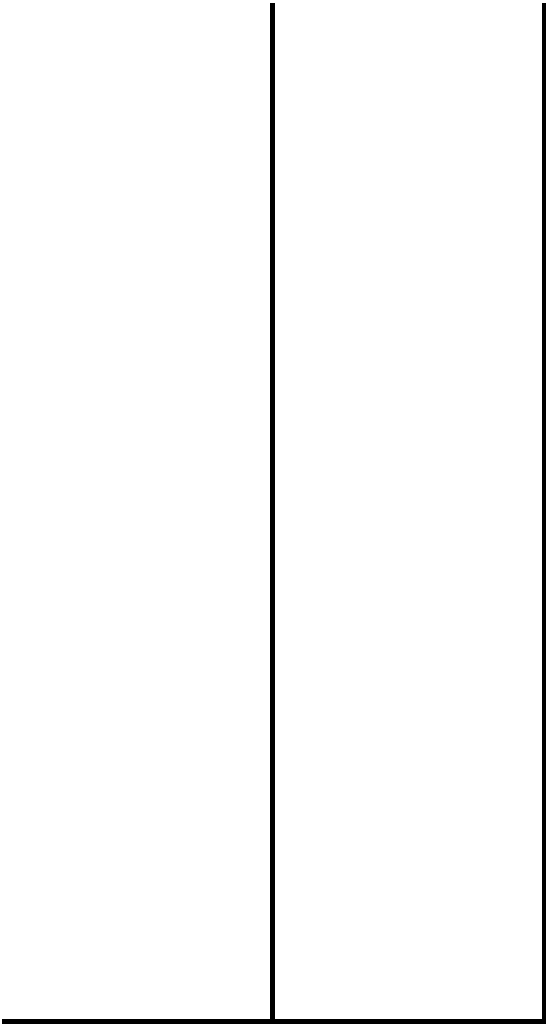
	<p>2 Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk</p>		
	<p>3 Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM</p>		
	<p>4 Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi</p>		

<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>

	Bagian Hukum Setda
--	--------------------

<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>
------------------------------------	---

	Bagian Hukum Setda
--	--------------------





**TINDAK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018**

DOMAIN 1										
KEBIJAKAN INTERNAL SPBE										
INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN	KELENGKAPAN DATA DUKUNG SAAT INI		RENCANA AKSI TAHUN 2018	
							ADA	BELUM ADA		
ASPEK 1										
KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE										
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE/TIK	LEVEL 3	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota tentang Tim Pengarah SPBE yang memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE			
						2	Laporan Pemantauan dan evaluasi secara berkala penerapan SPBE			
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja) terintegrasi?	LEVEL 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung standarisasi penyusunan proses bisnis	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Keputusan Walikota tentang SOP SPBE terintegrasi baik pusat maupun daerah dan perangkat daerah			
						2	Laporan Pemantauan dan evaluasi secara berkala			
DOMAIN 1										
KEBIJAKAN INTERNAL SPBE										
INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN				RENCANA AKSI TAHUN 2018
ASPEK 2										
KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN SPBE										

8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik?	LEVEL 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas Elektronik			
						2	SOP integrasi sistem tata naskah dinas elektronik			
						3	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala			

**DOMAIN 2  
TATA KELOLA SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN			RENCANA AKSI TAHUN 2018
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--	--	-------------------------

**ASPEK 3  
KELEMBAGAAN**

18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Apakah instansi Saudara memiliki Tim Pengarah SPBE?	LEVEL 3	Tim pengarah SPBE telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan	Kinerja Tim Pengarah SPBE dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebaiknya diukur, dinilai, dan dievaluasi secara kuantitatif da berkala	1	Laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan			
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi?	LEVEL 3	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada seluruh unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik sebaiknya dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala	1	Melakukan penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala			
						2	Laporan pemantauan dan evaluasi dan diperbaiki secara berkesinambungan			

**DOMAIN 3  
LAYANAN SPBE**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL	REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN			RENCANA AKSI TAHUN 2018
-----------	--------	------------	--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--	--	-------------------------

**ASPEK 6**

**LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**



				<p>pengajuan dan dokumen pegawai, dan lain sebagainya.</p>	<p>2 Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan kepegawaian diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN)</p> <p>3 Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
		Bagian Organisasi Setda
		Bagian Organisasi Setda
RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB

Bagian Organisasi Setda

RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
----------------------------	----------------------------	-------------------------------------

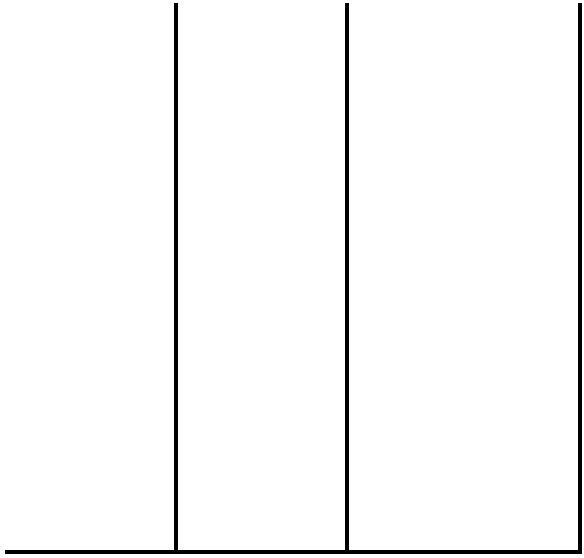
Bagian Organisasi Setda

Bagian Organisasi Setda

RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
----------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Bagian Organisasi Setda

Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan





TINDAK L

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL
31	Layanan Pengadaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pengadaan secara elektronik?	LEVEL 4	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi

**ANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018**

**DOMAIN 3  
LAYANAN SPBE**

REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI TAHUN 2018	RENCANA AKSI TAHUN 2019
--------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

**ASPEK 6**

**LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

<p>Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p>	1	<p>1. Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya 2.</p>		
	2	<p>Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi</p>		

<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>
	Bagian Layanan Pengadaan Setda

TINDAK L

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL
35-2	Layanan Publik Instansi Pemeintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	LEVEL 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.

**.ANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018**

**DOMAIN 3  
LAYANAN SPBE**

REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI TAHUN 2018	RENCANA AKSI TAHUN 2019
--------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

**ASPEK 7**

**LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK**

Layanan publik yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimanadapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal da eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan	1	Tersedianya sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang menyediakan layanan kolaborasi (Sistem Informasi Monitoring Sembako (SI'MBAK) <a href="http://simbak.bontangkota.go.id">http://simbak.bontangkota.go.id</a> )		
--	---	--	--	--

<b>RENCANA AKSI TAHUN 2020</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**TINDA**

INDIKATOR	URAIAN	PERTANYAAN	NILAI TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN LEVEL
35-1	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?	LEVEL 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.

**IK LANJUT HASIL INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2018**

**DOMAIN 3  
LAYANAN SPBE**

REKOMENDASI MENPAN	DATA DUKUNG REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI TAHUN 2018
--------------------	--------------------------------	----------------------------

**ASPEK 7**

**LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK**

Layanan publik yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan	1	Tersedianya Sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi (e-rt ( <a href="https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda">https://e-rt.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=beranda</a> , SIPUT ( <a href="https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home">https://siput.gunungtelihan.id/pages/media.php?module=home</a> ))	
--	---	--	--



RENCANA AKSI TAHUN 2019	RENCANA AKSI TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
		Kelurahan Gunung Telihan/Belimbing/Gunung Elai







TAHUN 2020				KETERANGAN
PEB	MAR	APR	MEI	
				7

BONTANG, 29 OKTOBER 2018

MENGETAHUI :  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

TTD

Hj. AJIZAH, SE, MM

NIP. 19651203 1994 03 2 003